

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pelayanan kesehatan merupakan pembangunan yang berkelanjutan yang menjadi prioritas nasional Indonesia dengan adanya sistem kesehatan yang tangguh dan mudah beradaptasi, tantangan dari aspek kesehatan dapat ditangani. Tantangan-tangan seperti kematian ibu, stunting, lingkungan kesehatan dan tenaga kesehatan serta faktor-faktor *economik and social determinants* diharapkan dapat teratasi.

Hal tersebut disampaikan oleh menteri kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, pada saat memberikan pernyataan pada sesi pleno sidang *world health Assembly* (WHA) ke 68 pada tanggal 19 Mei 2015, bertempat di kantor PBB Janewa, Swiss. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh adalah penguatan sistem keuangan kesehatan melalui jaminan kesehatan nasional (JKN).¹

Kesehatan juga merupakan hak bagi setiap warga negara hal itu tercantum pada Pasal 28 H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kesetaraan yang menyatakan semua orang berhak hidup sejahtera lahir batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Kemudian pasal 28 H nomor 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat nilai yang menjadi dasar mengapa hak atas kesehatan merupakan hak

¹ Kementrian Kesehatan republic Indonesia, Indonesia tekankan pentingnya pelayanan kesehatan primer dan Jaminan Kesehatan untuk wujudkan sistem kesehatan tangguh dan kuat, Diakses dari <https://www.kemkes.go.id/article/view/15052100005/indonesia-tekankan>. Pada Tanggal 12 Desember 2022.

asasi manusia dan secara konkrit telah mengurutkannya kedalam undang undang sistem jaminan sosial nasional. Pada pasal tersebut menjelaskan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas kesehatan merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk memenuhi hak kesehatan warga negara. Pengabaian hak atas kesehatan warga negara. Pengabaian hak atas kesehatan masyarakat berupa pengingkaran perlindungan dan penyediaan pelayanan kesehatan masyarakat yang layak merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Kemudian, kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia, karena itu setiap individu, keluarga, dan masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya. Pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi hak atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam bentuk penyediaan sarana dan fasilitas kesehatan yang layak, serta mudah di akses oleh masyarakat.

Wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah wilayah dengan daerah perbukitan yang memiliki ketinggian berkisar antara 11 – 500 m dari permukaan laut. Dari segi geomorfologis wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan daerah landai yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen). Wilayah dengan daerah yang bergelombang terdapat di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Sementara Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pemayung memiliki wilayah topografi yang cenderung lebih datar/landai.²

Di kabupaten Batanghari sendiri pusat pemerintahan kabupaten terletak di kecamatan Muara Bulian, untuk pelayanan kesehatan yang dimiliki di Kabupaten

² YANI, M., Maryani, M., & Mustika, D. (2021). *JUAL BELI BUAH-BUAHAN BUSUK PERSPEKTIF HUKUM BISNIS SYARIAH (Studi Kasus di Kelurahan Pasar Simpang Sungai Rengas Kec. Maro Sebo Ulu Kab. Batanghari Provinsi Jambi)* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi). Hlm 34

Batanghari terletak di beberapa kecamatan dan yang menjadi pusat pelayanan kesehatan kabupaten yaitu di Kecamatan Muara Bulian. Ada beberapa pukesmas yang menjadi pusat pelayanan di masing-masing kecamatan, disetiap kecamatan sendiri hanya memiliki 1 pukesmas inti. Pukesmas menjadi tempat pelayanan kesehatan di daerah atupun desa karna diketahui pelayanan kesehatan menjadi faktor yang sangat penting. Sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam pasal 30 ayat 3 menjelaskan Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak Pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta.

Sebagai pihak pemerintah daerah tentunya kabupaten batang hari memiliki kebijakan yang tertuang dalam Peraturan bupati Batang Hari no 21 tahun 2019 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan Kabupaten Batang Hari pada pasal 1 ayat 9 mengatakan pengembangan kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, lembaga, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/atau SPM kesehatan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Kemudian didukung dengan peraturan bupati batang hari no 12 tahun 2018 tentang penetapan alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam kabupaten batanghari anggaran 2018. Diperkuat lagi oleh perturan bupati batang hari nomor 34 tahun 2020 tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari. Dimana dalam

pasal 1 ayat 17 yang menjelaskan Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. Sejalan dengan Permenkes No 43 Tahun 2019 bahwa mengenai pelayanan kesehatan puskesmas dari SOP, fasilitas, tenaga dokter dan lain-lain tertuang didalamnya.

Pada tahun 2019 terjadi penemuan virus varian baru, pada saat yang bersamaan pula fasilitas ataupun pelayanan kesehatan sendiri menjadi sesuatu yang sangat penting sebagai pencegahan. Untuk beberapa daerah yang memang jauh dari jangkauan pemerintah, ada beberapa hal yang menjadi penghambat terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi penunjang pelayanan baik kepada masyarakat di antaranya:

1. sarana prasarana yang memadai,
2. biaya pelayanan, pegawai ataupun pelaksana kesehatan yang baik,
3. jarak tempuh.

Sedangkan dua faktor dari masyarakat pengguna pelayanan kesehatan adalah faktor pendidikan dan setatus sosial dalam masyarakat. Hak masyarakat di kabupaten batanghari tepatnya di kecamatan Batin XXIV sendiri pertama, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik meliputi penyuluhan kesehatan oleh pukesmas seperti mendapatkan edukasi mengenai stunting, dan penyakit yang memerlukan akses kesehatan yang memadai dan lansia yang memerlukan penanganan kesehatan yang tepat. Kemudian ada Beberapa faktor yang

mendominasinya yaitu : ekonomi, penyakit, jarak, dan lain sebagainya. Kemudian belum efektifnya posyandu untuk anak umur 0-2 tahun dalam mengontrol kesehatan anak dalam kurun waktu kurang lebih 3 tahun terakhir ini.

Hal ini bisa dilihat dari beberapa kasus yang terjadi baru-baru ini dimana seorang warga kecamatan batin XXIV yang bernama ibu ratih uwais tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari pihak puskesmas seperti yang dijelaskan dari kutipan dibawah ini:

Tadi adek ipar aku nak melahirkan yuk ruponyo masih pembukaan 1, jadi bidan menyarankan balik bae dulu, kyaknyo masih lamo. Mamak ado nanyo-nanyo entah dengan perawat entah dengan petugas nyo, apo lah di situ caro jawabnyo dan kalimatnyo dak pantas nian keluar dari mulut petugas kesehatan kayak gitu, sakit hati mamak aku yuk, tulisnya di kolom komentar. Salah satu warga simpang karmio membenarkan kejadian tersebut, ia mengatakan, ibu hamil itu akhirnya melahirkan di jalan. a menambahkan, “Akhirnya dalam perjalanan jam 2 malam Ibu hamil tadi kembali ke puskesmas lagi, namun tidak sampai ke puskesmas dan melahirkan di dalam mobil.”³

Dari penjelasan warga diatas dari segi kualitas ketepatan/respon yang diberikan kurang maksimal. Seharusnya sebagai pelayan public mereka sudah ada standar operasional dalam menjalankan tugasnya, yang dikenal dengan 3s senyum, sapa, dan salam. Kemudian yang membuat hal ini makin diperparah yaitu jarak perjalanan yang ditempuh juga cukup jauh sekitar 2 jam perjalanan.

Pada kecamatan Bathin XXIV sendiri yang menjadi tempat pelayanan kesehatan (posyandu) untuk masyarakat hanya terletak pada satu desa, padahal kecamatan ini memiliki jumlah lebih dari satu desa. Untuk pelayanan kesehatan di

³ Sungguh Miris/Memprihatinkan Pelayanan Di Puskesmas Durian Luncuk Kecamatan Batin Xxiv, Diakses dari <https://www.targetnewsid.com/sungguh-miris-memprihatinkan-pelayanan-di-puskesmas-durian-luncuk-kecamatan-batin-xxiv/>, Pada Tanggal 13 Januari 2024

kecamatan Batin XXIV sendiri terbilang cukup baik, namun ada hal yang menjadi faktor yang mendominasi penghambat terciptanya pelayanan yang baik. Faktor tersebut adalah sarana prasarana dan yang terjadi pada permasalahan ini sudah cukup lama namun masih kurang diperhatikan dari pihak Pemerintah Kabupaten. Ini bisa dilihat dari table jumlah posyandu yang ada di kabupaten batang hari dibawah ini:

Table 1
Jumlah posyandu dikabupaten

No	Nama puskesmas	Alamat
1	Mersam	Kel. Kembang Paseban, Kec. Mersam
2	Muara Bulian	Ds. Muara Bulian, Kec. Muara Bulian
3	Penerokan	Ds. Penerokan, Kec. Bajubang
4	Muara Tembesi	Km. 5 , Kec. Muara Tembesi
5	Sungai Rengas	Ds. Simpang Sungai Rengas,Kec. Maro Sebo Ulu
6	Durian Luncuk	Ds. Durian Luncuk, Kec. Bathin XXIV
7	Jangga Baru	Ds. Jangga Baru, Kec. Bathin XXIV
8	Pasar Terusan	Ds. Pasar Terusan, Kec. Muara Bulian
1	2	3
9	Jembatan Mas	Ds. Jembatan Mas, Kec. Pemayung
10	Selat	Ds. Selat, Kec. Pemayung
11	Tenam	Ds. Terusan, Kec. Maro Sebo Ilir
12	Muaro Sebo Ilir	Kec. Maro Sebo Ilir

13	Batin	Ds. Batin, Kec. Bajubang
14	Pasar Muara Tembesi	Kel. Pasar Muara Tembesi, Kec. Muara Tembesi
15	Tidar Kuranji	Ds. Tidar Kuranji, Kec. Maro Sebo Ilir
16	Aro	Ds. Aro, Kec. Muara Bulian
17	Puar	Ds. Sungai puar, Kec. Mersam

Sumber : (Badan Pusat Statistik Batang Hari Tahun 2018)⁴

Pemerintah kabupaten batanghari sebagai penyedia pelayanan kesehatan masyarakat telah berupaya semaksimal mungkin dalam mewujudkan suatu pelayanan kesehatan yang baik dan menyeluruh terhadap masyarakat. Beberapa peran seperti sistem jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) kebijakan tentang pengoprasian standar pelayanan minimal serta kebijakan lainnya yang semua telah berjalan, tetapi ada juga yang masih dalam tahap perumusan, sistem, jaminan kesehatan daerah merupakan salah satu kebijakan yang di keluarkan pemerintahan daerah kabupaten batanghari yang bertujuan untuk memudahkan setiap-setiap warga masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis di seluruh fasilitas kesehatan. Hak masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan berhak menerima pelayanan kesehatan yang baik dan memadai didalam fasilitas kesehatan tersebut.

Namun didalam pelayanan kesehatan yang diterima oleh masyarakat terdapat beberapa masalah di antaranya program badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) yang merupakan program dari pemerintah pusat yang di turunkan

⁴ Badan Pusat Statistik Batanghari, diakses pada tanggal 11 Desember 2022

atau dijalankan oleh dinas kesehatan daerah. Pada program ini memiliki kelemahan yaitu BPJS tidak bisa digunakan dengan waktu yang terbatas, kemudian di temukan juga pelayanan dari penggunaan BPJS dengan umum sangat berbeda dimana BPJS diperhambat prosesnya kemudian obat-obatan juga sedikit dan seadanya padahal masyarakat juga membayar BPJS setiap bulannya. Pada penanganan masyarakat dengan berobat umum atau bayar dimuka prosesnya dipercepat dan dipermudahkan dibandingkan dengan penggunaan BPJS itu sendiri, pada masalah ini sangat mendominasi di masyarakat termasuk di daerah Kabupaten Batanghari.

Pada pelayanan kesehatan di pukesmas kecamatan Bathin XXIV sudah cukup baik dari petugas kesehatan itu sendiri, petugas yang berjaga *standby* 24 jam dan yang berjaga di UGD mencapai 2-3 orang setiap harinya. Namun pelayanan yang baik belum cukup dalam penerima fasilitas kesehatan yang memadai karena faktor yang menjadi pelayanan yang baik juga harus di tunjang dengan sarana prasarana yang memadai juga. Pada pukesmas inti di Kecamatan Bathin XXIV sendiri belum memadai karena kurangnya fasilitas kesehatan seperti obat-obatan yang belum lengkap sehingga masyarakat harus membeli dengan mandiri di apotik terdekat atau di kabupaten.

Tabel 2

Jumlah Puskesmas per Kabupaten /Kota dalam

Pemenuhan Standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (Treshold 60%)

No	Nama wilayah	Jumlah puskesmas	Capaian 2021	Capaian 2022	% 2021	% 2022
1	Kab. Kerinci	21	8	10	38.10	47.62
2	Kab. Merangin	27	10	11	37.04	40.74
3	Kab. Sarolangun	16	6	7	43.75	43.75
4	Kab. Batang Hari	18	7	8	44.44	44.44
5	Kab. Muaro Jambi	22	19	19	86.36	86.36
6	Kab. Tanjung Jabung Timur	17	10	11	58.82	64.71
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	16	8	9	50.00	56.25
8	Kab. Tebo	20	8	9	45.00	45.00

9	Kab. Bungo	19	10	10	52.63	52.63
10	Kota Jambi	20	18	19	95.00	95.00
11	Kota Sungai Penuh	11	8	8	72.73	6364
	Provinsi Jambi	207	112	120	54.11	57.97

Sumber : Seksi Yankes Primer, Dinkes Provinsi Jambi, 2022

Dari penjelasan tabel diatas kabupaten Batanghari pada tahun 2021-2022 dalam pemenuhan standar sarana prasarana alat kesehatan mengalami pemberhentian peningkatan ditambah lagi jumlah tersebut tidak mencapai 60% yang telah ditargetkan oleh pihak provinsi. Hal ini diperjelas dengan keadaan dilapangan seperti mobil ambulance dikecamatan Batin XXIV hanya berjumlah satu, yang mana dalam kondisi saat ini mobil ambulance sangat di perlukan untuk mengantarkan dan menjemput pasien dalam kondisi yang kritis ataupun pasien dalam kondisi gawat darurat yang jauh daerahnya dari pukesmas inti. kondisi jalan yang dilalui juga sangat memprihatinkan dikarenakan mobil angkutan batubara yang sangat padat sehingga membuat jalan setiap hari macet. Maka dari itu perlu peranan pemerintah dalam pembuatan kebijakan baik dari segi penambahan fasilitas maupun program-program sebagai penunjang pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Pada penelitian terdahulu, terdapat beberapa penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan. Namun dari masing-masing penelitian yang dilakukan memiliki sudut pandang dan ciri khas masing-masing dalam focus penelitiannya. Dalam penelitian ini, mengacu pada 3 penelitian terdahulu yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Table 3
Penelitian Terdahulu

N o	Nama peneliti	Judul penelitian	Kutipan	Hasil penelitian
1	2	3	4	5
1	Regina Veranty Damopolii	implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat (studi di kecamatan kotamobagu selatan kota kotamobagu)	Damopolii, R. V. (2016). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Studi di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu). <i>Politico: Jurnal Ilmu Politik</i> , 3(1), 1168.	Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : 1.Implementasi kebijakan Pemerintah kota kotamobagu di kecamatan Kotamobagu Selatan dalam pelayanan
1	2	3	4	5
				Kesehatan Masyarakat dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang dimiliki, baik itu tenaga medis, dan prasarana sarana yang ada di pusat pelayanan kesehatan kecamatan kotamobagu selatan. 2. Kebijakan pemerintah daerah kota Kotamobagu dalam pemberian pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat masih bersifat pelayanan medis dasar, sedangkan untuk pelayanan medis lanjutan tidak dilayani
2	Muhammad Imanuddin	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui	Karim, M. I. T., Moenta, A. P., & Riza, M. (2018). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di	Implementasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di bidang kesehatan yang

	Taqwa Karim	Jaminan Kesehatan Nasional	Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional. <i>Amanna gappa</i> , 53-63.	memberikan jaminan kesehatan nasional sudah cukup baik. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan oleh BPJS Kesehatan di bidang kesehatan dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan untuk masyarakat daerah melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN) masih mengalami beberapa kendala, terutama terkait pendataan warga. Masih banyak warga yang belum terdaftar di Dlnas Kependudukan, sehingga tidak dapat menggunakan layanan BPJS. Selain itu sarana dan prasarana di FKTP dan Rumah Sakit belum memadai untuk semua jenis penyakit dan pengobatannya, sehingga BPJS belum dapat mengatasi masalah kesehatan masyarakat secara baik.
3	Yandrizal, Desri Suryani	Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu	Yandrizal, Y., & Suryani, D. (2015). Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu. <i>Jurnal Kesehatan Andalas</i> , 4(1).	Pemerintah Daerah harus menyusun strategi bersama dengan pemerintah pusat dan BPJS untuk meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, jumlah dan jenis tenaga untuk meningkatkan pemerataan akses dan mutu pelayanan; Upaya yang dapat dilakukan antara lain pengangkatan tenaga dokter dan dokter gigi untuk Puskesmas, memfasilitasi praktik dokter dan klinik untuk bekerja sama dengan BPJS sebagai FKTP; Bekerja sama dengan BPJS untuk memenuhi kekurangan tenaga; memberi rekomendasi pendidikan dokter spesialis bagi dokter umum non PNS. Menusulkan review Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

Pada beberapa penelitian mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan telah dibahas dalam sudut pandang dan masalah berbeda-beda. Persamaan pada ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis yaitu membahas kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam meningkatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu tempat penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yaitu di Kecamatan Batin XXIV, kemudian informan yang diwawancarai, dan yang terakhir yaitu rumusan masalah juga tentunya berbeda.

Permasalahan pelayanan kesehatan sendiri menjadi permasalahan yang kompleks atau sangat penting apabila suatu daerah tidak memfasilitasi daerahnya dengan fasilitas yang sesuai prosedurnya. Kecamatan bathin sendiri hanya memiliki 2 puskesmas inti dan tersebar di 2 kelurahan saja, memang dengan adanya puskesmas tersebut dapat menjadi pertolongan pertama apabila terjadi kemalangan terhadap warga kecamatan batin 24, namun dengan banyaknya desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Batin XXIV tidak dapat mengakomodir seluruh kegiatan yang berjalan maka dari itu perlu fasilitas penunjang agar dapat mengatasi hal tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk mendalami masalah yang terjadi dan peneliti mengambil judul **Kebijakan Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan di kecamatan BATIN XXIV.**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana pelayanan public di Puskesmas Batin XXIV?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui proses Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari
2. Secara teoritis untuk mengetahui bagaimana pelayanan public yang dilakukan pihak puskesmas batin XXIV kepada masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat yaitu :

- 1.4** Secara Teoritis, pemerintah melalui penelitian ini di harapkan mampu menjadi bahan acuan untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan datang.
- 2.4** Secara Praktis, di harapkan penelitian ini mampu menjadi informasi yang dapat memberikan solusi permasalahan yang akan datang.

1.5 Landasan Teori

1. Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor) sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁵

Kebijakan sendiri dibuat karena adanya permasalahan baru maupun bentuk pencegahan dari kebijakan yang telah dibuat. suatu kebijakan akan dianggap relevan apabila dalam pembuatannya melibatkan berbagai elemen pendukung. Dengan adanya masukan dari berbagai elemen diharapkan dapat membuat kebijakan yang mendukung serta menguntungkan semua pihak yang berhubungan.

Kebijakan publik, termasuk di dalamnya adalah tata kelola negara (governance), mengatur interaksi antara negara dengan rakyatnya. Pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana signifikansi kebijakan publik sebagai komponen negara. Sebagaimana dijelaskan Nugroho, setiap pemegang kekuasaan pasti berkepentingan untuk mengendalikan negara, sekaligus juga mengelola negara.⁶

Mengelola berarti mengendalikan dengan menjadikannya lebih bernilai. Pemerintah suatu negara dalam mengelola negara, tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih bernilai melalui apa yang disebut dengan kebijakan publik. Inilah tugas pemerintah atau negara sesungguhnya.

Kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah. Dalam kaitan ini, Dye mengartikan kebijakan publik sebagai “whatever government choose to do or not to do”. Kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk

⁵ Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1-12.

⁶ Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. *Semarang: Widya Karya*. Hlm 7

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dalam buku berjudul *Public Policymaking*, Anderson pun setuju dengan pandangan Dye tentang makna kebijakan publik sebagai “apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. Dalam kesempatan lain, Anderson (dalam Hill and Hupe) mengartikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan.⁷

Dari penjelasan diatas kita dapat mengetahui bahwa kebijakan merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, dalam hal ini lebih menekankan tentang kegiatan apa yang akan dibuat supaya nantinya bermanfaat bagi masyarakat banyak. Suatu kebijakan dibuat secara sengaja dan ada tujuan yang hendak diwujudkan. Kebijakan memiliki unsur-unsur yang dengannya dapat dimengerti mengapa kebijakan tersebut perlu ada.

Abidin (2006) mencatat ada empat unsur penting dari kebijakan, yaitu:

- (1) tujuan kebijakan,
- (2) masalah,
- (3) tuntutan (demand),
- (4) dampak atau outcomes.⁸

Suatu kebijakan dibuat berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan yang baik pasti memiliki tujuan yang baik pula. Tujuan yang baik memiliki sekurang-kurangnya tiga kriteria, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Tujuan yang diinginkan berarti tujuan tersebut dapat diterima oleh banyak pihak, karena kandungan isinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili

⁷ Ibid, Hlm 9

⁸ Ibid, Hlm 17

kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan kuat (dominan) dalam masyarakat. Tujuan yang baik harus rasional, artinya merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang diperhitungkan berdasarkan pada kriteria yang relevan dan masuk akal.

2. Pelayanan Publik

Menurut Mahmudi pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹ Maksudnya adalah sebagai penyelenggara kegiatan pelayanan public baik dari pemerintahan maupun pihak swasta dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi pelanggaran dan tidak merugikan pihak manapun.

Pelayanan public pada hakekatnya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan dengan kualitas yang prima kepada masyarakat, itu merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan prima sebagai kriteria pelayanan yang memuaskan. Didalam penelitian ini ingin melihat bagaimana kualitas pelayanan public itu berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Ibrahim Kualtias Pelayanan public adalah suatu kondisi yang dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan

⁹ Sellang Kamaruddin. Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori Dan Aplikasinya. (Yogyakarta: Ombak 2016), hlm. 76

dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan public tersebut.¹⁰

Pelayanan public pada intinya merupakan pelayanan dengan tujuan untuk memenuhi semua kebutuhan dan harapan masyarakatnya. Apabila masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan, itu tandanya pelayanan tersebut tidaklah berkualitas. Karena itu, pelayanan publik sangat penting dan selalu fokus dalam memenuhi kepuasan pelanggan.

Menurut Moenir, sebagai pihak yang ingin memperoleh pelayanan yang baik dan memuaskan perwujudan pelayanan yang didambakan adalah indikator-indikator yang meliputi meliputi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles.¹¹

3. Implementasi Kebijakan

Suatu kebijakan public dibuat tentunya memiliki sebuah tujuan, dan tujuan tersebut nantinya digunakan untuk hal banyak serta tentunya sangat berpengaruh terhadap negri ini. Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau

¹⁰ Hardiansyah. Kualitas Pelayanan Publik: Konsep,Dimensi,Indikator dan Implementasinya. (Yogyakarta: Gava Media 2018),hlm 55

¹¹ Kipityah Mariatul, Pudyaningsih Ratna, Oktafiah Yufenti, Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Dalam Penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), VOL:4, No1. Juni 2019, hlm. 31

tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud.¹²

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya.

b. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

c. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

d. Struktur Birokrasi.

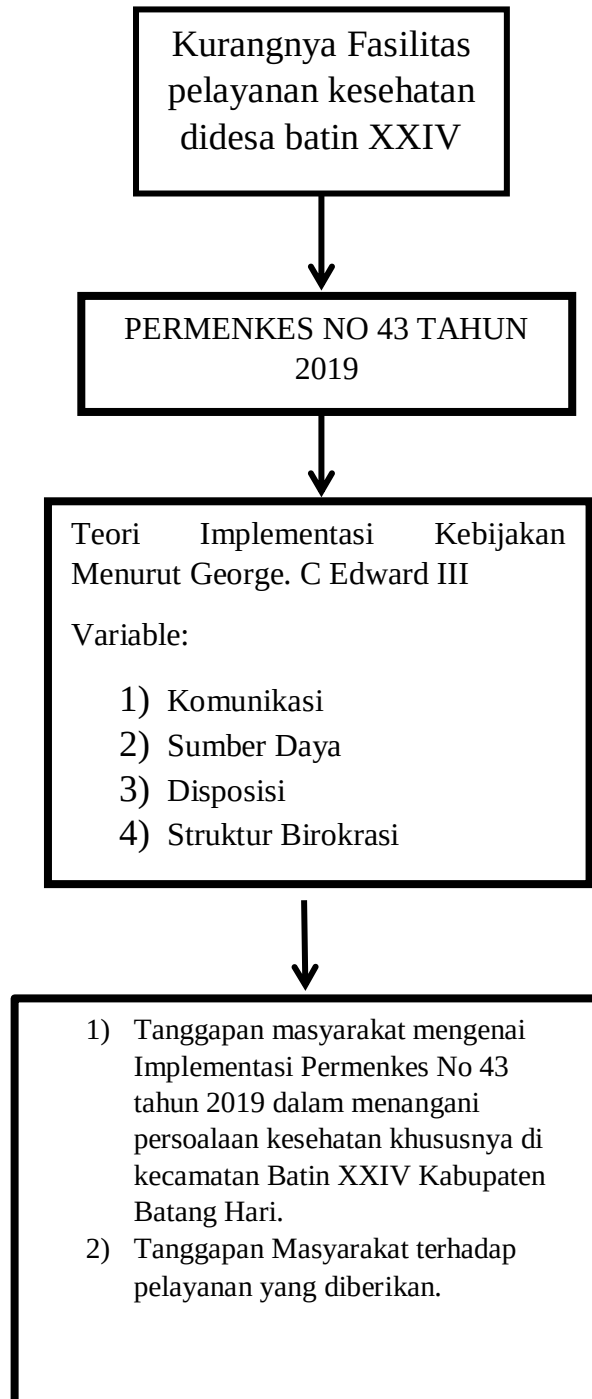
¹² Putra, A. A. (2021). Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pertamina (persero) Refinery Unit II Kota Dumai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). Hlm 53

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Proses ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi, yang berlangsung dalam hubungan berbagai variable.¹³

Hasil pemaparan dari teori George C. Edward III ini sesuai dengan apa yang ingin diteliti oleh penulis, dikarenakan suatu kebijakan baik itu berbentuk strategi, peraturan dan lain-lain harus mempunyai persiapan untuk menerapkannya. Adapun cara mempersiapkan agar penerapan kebijakan tersebut berjalan dengan semestinya maka diperlukan variable untuk mendukung hal tersebut. Model ini menjelaskan variabel implementasi kebijakan harus berjalan. secara linier dari segi komunikasi, sumber daya politik yang tersedia dan pelaksanaan implementasi kebijakan.

¹³ Prasasti, M. D. (2018). Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Bondowoso (Studi Di Kabupaten Bondowoso) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Jember). Hlm 4.

1.6 Kerangka Pikir



1.7 Metode Penelitian

1.1. Jenis Penelitian

Peneliti ingin mengetahui bagaimana Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin Xxiv Kabupaten Batanghari. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif harus searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah.

Menurut Denzin dan Licoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan di lakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁴ Secara singkat penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersirat mengenai struktur, tatanan, dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok partisipan.

Sementara itu menurut Jane Richie, penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia social, dan prespektifnya di dalam dunia,dari segi

¹⁴ Prof.Dr.Moelong,Lexy J,M,A., Metode Penelitian kualitatif,hlm5.

konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.¹⁵ Dari beberapa uraian di atas bahwa dapat disimpulkan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapkan fenomena yang ada di lapangan yang bersifat empiris dengan menggunakan kata-kata untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan serta menafsirkan hasil dari penelitian. Peneliti menggunakan model penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dikarenakan penelitian akan mencoba untuk menggambarkan keadaan secara obyektif yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen lainnya, mengenai Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam penelitian kualitatif. Pada dasarnya penentuan masalah menurut Lincoln dan Guba yaitu bergantung pada paradigma apakah yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu apakah ia sebagai peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan.¹⁶ Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini hal yang harus diperhatikan dalam masalah dan fokus penelitian. Penelitian ini difokuskan pada:

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari

¹⁵ *Ibid*, hlm6

¹⁶ Nugraha, Dito, Skripsi, Responsivitas Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Terhadap Masyarakat (Studi Kasus) Pdam Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun 2017, Hlm 27.

- b. Untuk mengetahui Pelayanan kesehatan yang diberikan pihak puskesmas Batin XXIV kepada masyarakat.

1.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian untuk melihat fenomena masalah yang sebenarnya terjadi, dalam rangka mendapatkan data-data akurat. Penetapan lokasi penelitian ditentukan secara purposive atau berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batin XXIV dan Dinas kesehatan sebagai instansi yang menangani permasalahan Kesehatan.

1.4. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Menurut Loftland dalam Moleong sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁷

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi:

¹⁷ Lexy J. Moelong. Metode Penelitian kualitatif. (Bandung: Rosadakarya,2017) ,hlm. 157

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul.¹⁸ Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Maka sumber data primer dalam penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara terhadap Kabag Dinas Kesehatan, dan Masyarakat yang tinggal dikecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya, serta diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Sumber data sekunder didapatkan dari berbagai bentuk seperti: berita surat kabar, website, artikel, dan referensi-referensi lainnya sebagai panduan peneliti dalam mendapatkan data atau informasi yang diperlukan.

1.5. Teknik Penentuan Informan

Dalam menentukan informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik purposive sampling dan isidental sampling. Purposive sampling yaitu

¹⁸ Hardani, dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), hlm: 121.

teknik penentuan informan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁹ Teknik Purposive Sampling ini biasa digunakan dalam penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menentukan responden dalam mendapatkan informasi mengenai Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari sebagai berikut:

Table 4

Informan Yang Diwawancarai

No	Nama informan	Jumlah
1	Kepala Bagian Dinas kesehatan Batanghari	1
2	Pimpinan Puskesmas Batin XXIV	1
3	Masyarakat Kecamatan Batin XXIV	5
Jumlah		7

Alasan pemilihan informan tersebut berdasarkan kecakapan informasi yang dimiliki para informan sehingga mampu menjawab pertanyaan peneliti dalam melakukan penelitian, setelah melalui proses pertimbangan mengenai keterbatasan waktu, tenaga, pikiran serta materi, sehingga didapatkan hasil bahwa informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari Kabag Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Hari, dan Masyarakat Yang Tinggal Di kecamatan Batin XXIV.

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 2008 hlm 85.

1.6. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Observasi

Menurut Pasolong observasi suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.²⁰ Observasi pada penelitian ini yaitu penulis mencatat dan melihat langsung bagaimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Batanghari dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dengan melihat penerapan kebijakam, masalah, tuntutan, dan dampaknya.

b. Teknik Wawancara

Menurut Pasolong wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung.²¹ Wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara terstruktur, karena peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Untuk itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument berupa pertanyaan tertulis dengan jawaban alternatifnya telah disiapkan dan setiap responden diberikan pertanyaan yang sama. Wawancara ini digunakan untuk menggali data terkait, Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

²⁰ Pratiwi, Agustina, Skripsi: Responsifitas Pelayanan Program Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif) OJK Provinsi Lampung. (Lampung: Unila, 2019), hlm. 47.

²¹ *Ibid*, hlm 48.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya yang mengetahui tentang narasumber.²² Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumen resmi, dokumen resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal.

Dokumen internal berupa memo, pengumuman, intruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu untuk digunakan dalam kalangan sendiri. Sedangkan Dokumen Eksternal berupa informasi yang dihasilkan oleh lembaga social, misalnya majalah, bulletin perntaan dan berita yang disiarkan di media masa. Dokumen-dokumen tersebut harus menyangkut tentang Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

1.7. Teknik Analisis Data

Teknik Analisi Data Menurut Bodgan dan Biklen dalam Moleong data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitensiskannya, dapat diceritakan kepada orang.²³ Maka dari itu perlu dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

²² Pratiwi, Agustina, *Op.Cit*, hlm 48.

²³ *Ibid*, hlm 49-50.

a. Reduksi Data

Penulis melakukan proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang diperoleh dari observasi langsung pada tahap pengumpulan data. Kemudian data tersebut di pilih berdasarkan fokus penelitian yaitu Kebijakan Pemerintah daerah batanghari dalam meningkatkat pelayanan kesehatan serta, dampak dari penerapan strategi tersebut.

b. Penyajian Data

Penulis menyusun dan merangkai informasi dari observasi, wawancara, dan dokumentasi mengenai Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

c. Verivikasi Data

Tahap akhir proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan terhadap Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²⁴

1.8. Teknik Keabsahan Data/Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁵ Dalam penelitian ini digunakan triangulasi dengan sumber. Patton dalam Lexy, J Moleong menjelaskan triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian. Hal itu dapat dicapai dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan Implementasi Permenkes No 43 Tahun 2019 Dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Batin XXIV Kabupaten Batanghari.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. CV. Alfabeta, Bandung, 2008, hlm 252.

²⁵ Lexy J. Moelong. Metode Penelitian kualitatif. (Bandung: Rosadakarya,2017) ,hlm. 330.